

## PERKEMBANGAN ORTODOKSI ISLAM DI PALEMBANG HINGGA AWAL ABAD XX

Aflatun Muchtar  
Fakultas Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang  
[Aflatun\\_m@yahoo.com](mailto:Aflatun_m@yahoo.com)

Arustophan Firdaus  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang  
Topan22\_m@yahoo.com

**Abstract :** This article will discuss the shape Islam in Palembang until early XX century. This article uses the theory of Islamic classification of Indonesia according to the fiederspiel between Orthodox Islam and Nominal Islam. Orthodox Islam according to fiederspiel (1970) is a group that runs sharia or Islamic tradition firmly based on the understanding of the text. By negating the differences in looking at the elements of local tradition (pure Islam / modernist and traditional Islam) this group has a tendency towards the identity of Islam as the most prominent or embracing it in the political ideology and making it a lifeline. While the nominally Islamic group, is a group that does not place Islam as a primary identity, or as a political ideology. Although the nature of Islamic orthodoxy is more salient but the pragmatism of Islamic political elites can lead to more dynamic political behavior by adjusting to political escalation at the national level.

**Keywords:** islamisasi, orthodoxy, Palembang, typology, pragmatism

**Abstrak :** Artikel ini akan membahas corak bentuk keislamaan yang ada di Palembang hingga awal abad XX. Artikel ini menggunakan teori klasifikasi islam indonesia menurut fiederspiel antara Islam Ortodok dan Islam Nominal. Islam ortodoks menurut fiederspiel (1970) adalah kelompok yang menjalankan syariat atau tradisi islam secara teguh yang dilandaskan pada pemahaman akan teks. Dengan menegasikan perbedaan dalam memandang unsur tradisi local (islam murni/modernis dan islam tradisional) kelompok ini memiliki kecenderungan akan identitas islam sebagai hal yang paling menonjol atau memeluknya dalam ideology politik dan menjadikannya sebagai pegangan hidup. Sementara kelompok islam nominal, adalah kelompok yang tidak menempatkan islam seperti identitas utama, atau sebagai ideology politik. Meski sifat ortodoksi Islam lebih menonjol namun sikap pragmatism elit-elit politik Islam bisa menyebabkan perilaku politik yang lebih dinamis dengan menyesuaikan diri terhadap eskalasi politik di tingkat nasional.

**Kata kunci :** Islam, ortodoksi, Palembang, tipologi, pragmatisme

## **A. Masuknya Islam dan Proses Islamisasi di Palembang**

Kapankah pertama kali Islam masuk di Palembang? Persisnya jawaban dari pertanyaan ini masih bersifat spekulatif. Hal ini disebabkan karena langkanya sumber-sumber sejarah, sebagaimana halnya dengan menentukan sejarah masuknya Islam di Indonesia, di mana banyak teori yang saling berargumentasi.

Dalam sebuah seminar bertajuk “Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan” pada Nopember 1984 antara lain disimpulkan bahwa masuknya Islam di Palembang sudah ada sejak abad ke 7 M, ketika itu Palembang masih merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya. Artinya, spekulasi mengenai masuknya Islam di Palembang juga sama waktunya dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Bahkan spekulasi ini menyebut bahwa pintu masuknya Islam di Indonesia adalah Palembang. Ketika itu, pedagang-pedagang Islam dari timur tengah datang dan bermukim di Palembang. Atas izin penguasa Sriwijaya mereka ini dapat menjalankan ajaran Islam di Kota ini (Gadjahnata, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumsel*; Rahim, *Sistem otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*)

Menurut Azyumardi Azra, ahli Islam di Asia Tenggara, masuknya Islam di Palembang terjadi pada abad ke-7. Masa-masa awal kehadiran Islam pertama kali dilaporkan oleh seorang agamawan dan pengembara terkenal dari Cina, bernama I-Tsing. Ia menginformasikan bahwa pada 51 H/671 M, ia menumpang kapal Arab dan Persia untuk berlayar dari Kanton dan berlabuh di pelabuhan muara sungai Bhoga, yang disebut juga Sribhoga atau Sribuza, yaitu Musi sekarang. Banyak sarjana modern mengidentifikasi Sribuza sebagai Palembang, ibukota kerajaan Budha Sriwijaya pada masa itu. Menurut Yuantchao kapal yang sampai di Palembang berjumlah sekitar 35 kapal dari Persia. Secara geografis, letak Sriwijaya yang berada di jalur perdagangan internasional memberi pengaruh besar terhadap dunia luar. Beberapa peristiwa yang terjadi di luar daerah kekuasaannya, misalnya perubahan politik di India yang saat itu di bawah hegemoni Buddha, menjadikan Sriwijaya sebagai wilayah Buddha yang dapat dijadikan pilihan. Ini menempatkan Sriwijaya sebagai pusat terkemuka keilmuan Buddha di Nusantara. I-Tsing, yang menghabiskan beberapa tahun di Palembang dalam perjalanannya menuju ke dan kembali dari India, merekomendasikan Sriwijaya sebagai pusat keilmuan Buddha yang baik bagi para penuntut ilmu agama ini sebelum mereka melanjutkan pelajaran ke India. Meskipun Sriwijaya sebagai pusat keilmuan Buddha, tetapi ia memiliki watak yang kosmopolitan. Kondisi ini memungkinkan masuknya berbagai pengaruh atau ajaran lain, termasuk agama Islam. Watak Sriwijaya yang kosmopolitan itulah yang memungkinkan para

pengungsi Muslim Arab dan Persia yang diusir dari Kanton setelah terjadi kerusuhan di sana, mereka melakukan eksodus menuju Palembang untuk mencari suaka politik dari penguasa setempat. Pada Abad ke-9 berdasarkan beberapa catatan dari Arab dan China dilaporkan bahwa proses Islamisasi telah mencapai penduduk pribumi di kalangan masyarakat Sriwijaya. Keberadaan penduduk pribumi Muslim di Sriwijaya bahkan dipercaya sebagai duta untuk bangsa Arab dan China.

Hingga runtuhnya kerajaan Sriwijaya, Islam mulai menjadi bagian dari kekuasaan pada masa akhir dari kerajaan Majapahit, ketika Ario Damar, seorang Adipati dari Kerajaan Majapahit di Palembang, memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi atas ajakan Raden Rahmat ketika ia singgah di Palembang. Peristiwa ini terjadi kira-kira pada akhir abad ke-15 ketika Palembang masih menjadi wilayah kekuasaan Majapahit,

Ario Damar, menurut cerita tutur atau babad Jawa dikenal sebagai orang kepercayaan Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, untuk membesarkan anak Brawijaya dari seorang selir berkebangsaan Tiongkok. Anak tersebut dikenal sebagai Raden Patah. Raden Patah kelak mendirikan Kerajaan Demak, Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada saat Raden Patah berusia 20 tahun, Ario Damar mengirimkannya ke Pulau Jawa bersama Raden Kusen untuk belajar pengetahuan agama kepada Sunan Ampel. Mengutip sumber babad Purwaka Caruban Nagari, Uka Tjandrasasmita mengatakan bahwa di Pula Jawa, Raden Patah, yang dalam Babad Tanah Jawi disebutkan bergelar Senopati Jimbun ini, memperoleh dari Raja Majapahit sebuah tanah perdikan bernama Glagah Wangi. Dimulai dari tanah inilah Raden Patah kelak, atas bantuan Wali Songo mendirikan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri berdiri ketika Raja Majapahit, Kertabhumi meninggal pada tahun 1478 M. Berdirinya Kerajaan demak ini juga menandai runtuhnya Kerajaan Majapahit dan dimulainya era Kerajaan Islam. Sejak saat itulah Palembang sendiri mulai di bawah kekuasaan Kerajaan Islam. Ario Daar atau Ario Dillah yang tadinya adalah Adipati Kerajaan Majapahit kini memimpin Palembang yang telah menjadi protektorat kerajaan Demak Islam. Selama dua abad selanjutnya (abad ke-16 dan ke-17 M) Palembang menjadi subordinat dari Kerajaan Islam di Jawa. Pemerintahan Islam di Palembang baru berdiri sendiri pada akhir abad ke-17 M.

Sebelum abad ke-16 M proses Islamisasi nampaknya masih belum menonjol, meskipun Pemerintahan Palembang telah berada di bawah kekuasaan di Jawa. Proses Islamisasi mulai berkembang pada abad ke-17 dengan ditandai akan munculnya kegiatan keagamaan dan berdirinya Masjid sebagai sarana ibadah. Diperkirakan bahwa Masjid pertama di Palembang berdiri sebelum tahun 1660. Masjid ini kemudian terbakar ketika terjadi pertempuran dengan Belanda pimpinan

Mayor Joan Van Der Laen pada tahun 1659. Pada tahun 1663 masjid lainnya didirikan di Palembang disebut Masjid Lama.

Selanjutnya setelah dua abad menjadi bagian dari Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, maka pada tahun 1666 Palembang secara resmi menjadi sebuah kesultanan yang berdiri sendiri. Adalah Raden Tumenggung yang mengukuhkan dirinya sebagai Sultan Ratu Abdurrahman dengan mengambil gelar Sultan Jamaluddin pada tahun 1681.

Proses Islamisasi di kalangan elit kekuasaan nampaknya terus terjadi selama periode Kesultanan Palembang sejak 1666 sampai dengan 1823. Akan tetapi selama masa ini, menurut Taufik Abdullah, dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Nusantara, perkembangan Islam di Palembang (Sumatera Selatan) berjalan agak lambat. Hal ini disebabkan karena dua hal. Pertama, kalangan istana tidak memainkan peranan berarti dalam proses tersebut. Para Sultan lebih banyak disibukkan oleh masalah-masalah politik dan ekonomi, sehingga tidak cukup banyak untuk mengurus kegiatan pengajaran Islam. Sultan juga banyak disibukkan oleh masalah-masalah politik untuk memelihara kesetiaan daerah pedalaman yang berperan sebagai tulang punggung ekonomi Kesultanan dengan menyediakan komoditas ekspor. Kedua, kalangan Ulama, khususnya kalangan Ulama birokrat, lebih sibuk melayani dan memenuhi kebutuhan Kesultanan. Ulama juga tidak memiliki hubungan yang intim dengan Sultan Palembang, Pengaruh Ulama sangat tergantung kepada kemampuannya untuk meyakinkan Sultan.

Meskipun perkembangan Islam di Sumatera Selatan tampak tertinggal dibandingkan beberapa daerah lain di Nusantara, realitas historis menunjukkan bahwa Islam adalah agama telah masuk dan berkembang hingga ke pedalaman di Palembang. Selain itu, proses islamisasi yang dianggap kurang berkembang saat itu adalah belum terwujudnya institusi dalam menyiarkan Islam. Baru pada 25 Juni 1748 di Pusat Kota Palembang Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1724-1758) yang sampai kini dikenal sebagai Masjid Agung. Perkembangan lain selama masa Kesultanan Sultan Mahmud Badarudin adalah kegiatan pengajaran dan pengkajian agama yang dilakukan oleh Ulama di lingkungan Kesultanan yang terpusat di Masjid Agung. Pengajaran agama masih terpusat di lingkungan Kota Palembang dan belum mencapai pedalaman.

Proses Islamisasi terus berlanjut pasca peralihan kekuasaan pada tahun 1823 dari tangan penguasa Kesultanan Palembang terakhir, Sultan Ahmad Najamuddin II, ke tangan Kolonial Belanda. Dari beberapa laporan pejabat Pemerintah Kolonial mengungkapkan bahwa pada decade awal kekuasaan Belanda ketaatan penduduk Kota Palembang belum tampak nyata, tetapi sejak tahun

1850 sampai 1880-an dan ahir abad ke-19, terjadi peningkatan kualitas keberagaman di kalangan masyarakat. A Kortenhorst, seorang missionaris yang mengunjungi Palembang pada pergantian abad, menceritakan beberapa hal tentang kegiatan keagamaan masyarakat Muslim di Kota Palembang dalam sebuah laporan yang ditulisnya pada tahun 1902. Kortenhorst, sebagaimana dikutip oleh Peeters, antara lain mengungkapkan bahwa penduduk Kota Palembang akrab dengan kitab suci Al-Quran, Masjid Agung telah banyak dikunjungi oleh massa untuk melakukan sholat Jum'at, dan telah banyak jamaah haji yang bertolak dari Masjid Agung untuk melaksanakan ibadah Haji ke Mekkah. Berdasarkan berbagai laporan tersebut, Peeters sampai pada suatu kesimpulan bahwa pada abad ke-19 Palembang telah mengalami suatu proses Islamisasi yang lebih lanjut.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kedatangan awal Islam di Sumatera Selatan sudah terjadi sejak abad ke-7 M. Akan tetapi Islamisasi selanjutnya, berkembanglah model pengajaran Islam sesuai dengan syariat di wilayah ini baru pada abad ke-16 dan mengalami intensifikasi pada masa Kesultanan Palembang Darussalam (abad ke-17 dan 18 M) dan masa pemerintahan Kolonial Belanda (abad ke-19 dan awal abad ke-20)

Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa Islamisasi awal masih terbatas di Kota Palembang, dan belum intensif mencapai daerah pedalaman Palembang. Islamisasi di Palembang belum dianggap intensif. Kemajuan perkembangan Islam di Palembang menurut Peeters justru terjadi setelah era pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1821. Peeters mendasarkan catatan dari JJ van Sevenhoven yang pada tahun 1822 dikirim sebagai komisaris pemerintah ke Palembang, dari uraiannya tentang Praktek keagamaan di ibu kota Palembang diungkapkannya

“Dari apa yang di sana-sini saya sebutkan secara sambil lalu tentang agama, dapat disimpulkan, bahwa mereka menganut agama Islam. Mereka mempraktekkan agama mereka dalam khitanan, perkawinan dan upacara lain; tetapi di samping itu, mereka dihinggapi segala sesuatu yang sifatnya takhayul, baik oleh yang ada di Jawa maupun oleh kisah turun temurun agama yang menyembah berhala. Begitu rajinnya orang Arab mematuhi kewajiban agama seperti waktu salat, puasa dan sebagainya, begitu sedikit orang Palembang meladakukannya. Mereka paling banyak, ya bahkan patut dicela tidak peduli dan tidak beragama.”

Apa yang dilakukan oleh Van sevenhoven tentunya pandangan dari perspektif kelompok orientalis. Orientalis dalam pengertian itu adalah mengenai diskursus tanah jajahan sebagai daerah pheri-pheri, dipandang berkebudayaan rendah dan jauh dari ideal yang berarti harus diliuruskan. Oleh sebab itu, bagi pihak colonial tidaklah penting untuk memahami world view masyarakat local mengenai spiritualitasnya. Yang diketahuinya adalah perspektif barat (modern) yang memandang segala daerah taklukan harus “dicerahkan” yang tujuannya adalah membenarkan tindakan penaklukan.

Sebenarnya, agama telah mendapatkan tempat dalam pemerintahan Kesultanan Palembang. Kesultanan memiliki departemen yang secara khusus mengurus masalah agama. Urusan agama dikepalai oleh Pangeran Penghulu Nata Agama yang dibantu oleh staf-stafnya. Mereka adalah pejabat agama yang diangkat langsung oleh Sultan dengan tugas mengatur urusan agama Islam masyarakat Palembang. Urusan keagamaan ini bahkan diatur dalam Undang-undang Simbur Cahaya Bab Kaum. Tugas penghulu antara lain menikahkan orang, mengurus masalah zakat, dan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama bagi masyarakat. Tugas pengajaran itu dimulai dari pelajaran mengenal huruf Arab untuk mengaji Quran dan membaca kitab, memimpin doa dan ibadah lainnya. Tugas pengajaran dilaksanakan oleh pejabat agama tingkat bawah yakni Khatib dan Bilal.

## **B. Menuju Ortodoksi Islam Di Kota Palembang**

### **1) Peran Kelompok Sayid**

Islamisasi yang berada di kota Palembang dalam hal ini penanaman terhadap syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari peran para Sayid atau Alawiyin. Di bidang agama pengaruh Sayid paling besar. Para Sayid di sini baik Sayid di lingkungan Kesultanan maupun di luar itu. Bahkan di lingkungan Kesultanan sebagian besar dari mereka adalah Sayid, seperti Sayid Mustafa Alaidrus sebagai imam Susuhan Abdurrahman, Sayid Alaidrus sebagai Imam pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I, Sayyid Abdurrahman Maula Tuga'ah sebagai Imam Sultan Ahmad Najamuddin I dan Datuk Murni Al Haddad sebagai Imam Sultan Bahauddin. (Mujib, Pemilihan Ulama Kesultanan Palembang: Primordialisme atau Otoritas Sultan, Jurnal Intizhar, No 9. 1997:22-31). Namun sebenarnya peran Sayid di luar lingkungan kesultanan lebih besar dalam mengajarkan ortodoksi Islam kepada masyarakat umum.

Di zaman kesultanan, pendatang dari arab secara diam-diam meremehkan praktek agama di Palembang. Bahkan mereka menyebut pihak keraton Palembang Darussalam sebagai abangan (Van Sevenhoven melalui Peeters 1997:23). Jatuhnya keraton dengan segala implikasi sosialnya membuka jalan kepada kepada para Sayid untuk menunjukkan dominasinya di bidang keagamaan. Dalam praktek keagamaan, sayyid sangat menekankan ketaatan kewajiban ritual. Untuk itu biasanya sayyid membangun rumah ibadah atau langgar di wilayahnya sendiri. Keuntungan dari berniaga diubahnya untuk membangun modal sosial melalui agama dalam bentuk wakaf. Langgar ini biasanya terletak di dalam wilayah pelindung yang membangun tempat ibadah itu. Misalnya di kampong 13 Ulu

didirikan langgar di samping kompleks kediaman Al Munawar dan dibangun oleh keluarga yang sama. Langgar ini tidak hanya berfungsi sebagai rumah ibadah tetapi juga digunakan untuk mengajarkan pelajaran Agama Islam. Di sinilah para Sayid mengkritik keagamaan masyarakat local yang dianggapnya tidak sesuai dengan syariat agama. Mereka memperkenalkan ibadah wajib dan mengajarkan tata caranya kepada penduduk local di langgar-langgat tempat mereka.

Strategi agama para Sayyid, pertama-tama menyasar kepada penduduk kampung yang tergantung kehidupannya pada para sayid. Nasib pedagang perantara di kota Palembang terutama tergantung dari pemberian uang muka oleh orang arab kaya. Di pertengahan abad ke-19, golongan pedagang terdiri dari para pemborong dan para pedagang perantara menjadi kategori paling besar di kalangan penduduk kota. Dengan menyediakan kredit untuk pedagang, saudagar Arab mempunyai jaringan klien yang luas. Di samping itu, banyak Alawiyin menjadi pemilik toko dan rumah di kota Palembang yang mereka sewakan kepada orang Palembang, syaratnya bahwa anak mereka harus mengikuti pelajaran agama di langgar yang dibangun di kompleks mereka. Akibat siasat budaya ini, penduduk Palembang dari strata sosial yang lebih rendah dipaksa mengikuti pola kebudayaan religious dari golongan Arab. (Peeters, 1997:21).

Proses Islamisasi yang dimotori modal perdagangan tidak membatasi diri pada kampung yang secara sosial dan ekonomi dikuasai orang Arab. Dengan penambahan status Sayid, kelompok sosial yang lain juga mulai tertarik pada pola kebudayaan yang bergengsi ini. Terutama untuk orang Palembang yang kaya, orang Arab menjadi contoh dari pematuhan yang baik kode ritual agama Islam. Prestise sosial terutama dapat diungkapkan lewat perlindungan agama, yang sering kali mengambil bentuk pembangunan langgar.

## 2) Berkembangnya Pengajaran Islam

Meskipun peran kelompok Alawiyin menonjol dalam proses Islamisasi ini, peran dari para ningrat tidak boleh dikesampingkan. Para Sayid dan Ningrat sejak dulu sudah terdapat ikatan sosial yang erat berdasarkan ikatan kekeluargaan, dan dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga sering bergaul satu sama lain. Interaksi ini cukup banyak membantu penyebaran pola kebudayaan ortodok di kalangan para ningrat. Susudah kekuasaan politik diambil dari tangan kelompok ningrat, para bangsawan Palembang mulai mencari sumber prestise alternative, yaitu dari sumber politik ke pengajaran agama. Para kelompok ningrat yang tidak mendapatkan pekerjaan lagi dari runtuhnya pemerintahan Kesultanan. Mereka banyak belajar agama dan menjadikan guru agama ini sebagai profesi.

Perkembangan pengajaran agama di Palembang pada abad ke-19 antara lain dirangsang oleh posisinya sebagai pusat lalu lintas perdagangan dan memiliki pola pikir modern di mana penduduk kota lebih cenderung mementingkan pendidikan. Mereka lebih menaruh perhatian di bidang pendidikan bagi anak-anaknya. Hal ini juga sebagai upaya untuk memperlancar dan menguasai perdagangan seperti ilmu membaca, berhitung dan menulis. Tak terkecuali di bidang agama. Agama seperti dikatakan merupakan salah satu cara interaksi antar pedagang terkhusus para pribumi dengan kelompok Arab. Pengajaran agama di Palembang juga mengalami peningkatan. Pada tahun 1900 tercatat lebih dari 230 tempat pengajaran agama dengan jumlah murid sekitar 4500 di Kota Palembang sebagai tempat terpenting dalam pengajaran agama Islam.

Pendidikan agama di Palembang sebelum abad ke-20 tidak dapat disamakan dengan Jawa, di mana Islam berkembang salah satunya melalui Pesantren. Di Palembang tidak memiliki tradisi Pesantren atau padepokan. Pengajaran yang dilakukan lebih terpusat di masjid. Masjid menjadi pusat pengajaran Islam yang cukup penting dalam proses Islamisasi di Palembang. Masjid tidak hanya merupakan lembaga agama, namun tempat untuk kumpul bagi laki-laki dan tidur di saat malam. Masjid Penghulon atau Masjid agung memiliki peranan penting di bidang keagamaan terutama bidang hokum, seperti halnya peranan kauman di Jawa, namun perbedaannya di Palembang, Masjid Agung tidak hanya berperan sebagai lembaga hokum dan ibadah juga berperan dalam propaganda tasawuf. Masjid agung dalam kegiatannya salah satunya adalah penyelenggaraan pembacaan ratib Sammaniyah. Jika di Jawa Pesantren menjadi pusat penelaahan ilmu agama terutama tasawuf, sebaliknya di Palembang, penelaahan ilmu agama berada di pusat kota.

Memasuki abad ke-20 perubahan sosial di Palembang yang disebabkan oleh factor ekonomi semakin pesat dan berpengaruh pada dinamika keagamaan di Palembang. Awal abad ke-20 Palembang ditandai dengan boom karet yang memberikan peluang-peluang bagi tumbuhnya kelas elit pengusaha pribumi baik di daerah ulu maupun ilir Palembang. Sebelum Abad ke 19 peran para sayyid sangat besar dalam bidang keagamaan karena tidak terlepas dari jaringan perdagangan yang dimilikinya, namun memasuki abad 19 Belanda berupaya memperkecil peran Sayyid. Mereka tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan aktifitas perdagangannya di wilayah Pedalaman. Ketika peran dagang para Sayid melemah, sebaliknya akibat boom karet dan kopi dari uluan Palembang, elit kelas pengusaha pribumi mulai tumbuh. Mereka mulai mengubah modal ekonomi yang dimilikinya menjadi modal agama, mulai dari melakukan ibadah haji, mengirim anak-anaknya untuk belajar di Timur Tengah, yang pada akhirnya berkecimpung dalam lembaga-lembaga pendidikan agama. Kaum pribumi Palembang telah menyelenggarakan berbagai lembaga pendidikan, bahkan di antaranya telah

banyak mengaplikasikan system pengajaran modern, yang menggabungkan system modern berupa pemakaian bangku, papan tulis dan system klasikal dengan mempertahankan pengajaran Islam klasik sorogan dalam membaca kitab kuning. Menariknya lembaga Islam tradisional telah menerapkan system baru itu. Dari situlah orang-orang pribumi lambat laun mulai menggantikan dominasi kalangan Sayid dalam peran keagamaannya. Hal lainnya yang perlu diketahui, bahwasanya lembaga-lembaga pendidikan tersebut berada di luar struktur kelompok Kauman Ningrat kalangan Mesjid Agung. Mereka adalah para ahli-ahli di bidang agama yang membentuk jalinan clientisme dengan pengusaha. Jalinan itulah yang menjadi inisiator terbentuknya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lebih formal seperti terbentuknya Madrasah di Palembang.

### 3) Peran Kelompok Tarekat

Gerakan Islam di Palembang kota pada mulanya yang berkembang adalah tarekat. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa kelompok Sayid memiliki perilaku keagamaan yang berbeda dengan penduduk setempat, khususnya kecenderungannya dalam menekankan syarat. Mistisisme Islam yang berkembang di Hadramaut diintroduksi oleh kelompok Alawiyin di Palembang. Sufisme ini berbentuk tarekat, yang berkembang di kalangan Sayid bernama tarekat Alawiyah. Sesuai dengan tradisi klan Alawiyin, tarekat ini juga memiliki cabang-cabang lain seperti Alaydrusiyah, Alatasiyah, dan Alhadadiyah. Namun kemudian yang berkembang di Palembang di antara kelompok arab adalah tarekat Alawiyah.

Petunjuk tersebarnya tarekat ini di Palembang dijumpai dalam bentuk naskah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa melayu, berjudul *Sabil al Hidayah wa al-arsyad* karangan Sayyid Ahmad bin Hasan bin Abdullah Alhadad (1634-1719 M). Kitab ini mengandung penjelasan tentang ratib Alhadad gubahan Abdullah Alhadad, pendiri tarekat dengan nama yang sama. Nama tersebut adalah tokoh penting di bidang mistik dari Hadramaut dan menjadi panutan bagi jaringan Sayid di Asia Tenggara Sesuai dengan sifat umum dari mistik di Hadramaut, Alhadadiyah tidak ditanda dengan spekulasi teoritis, namun lebih kepada amalan-amalan yang cukup banyak, dalam bentuk latihan ratib dan zikir. Menurut Abubakar Atjeh (1980:378), di Palembang pada tahun 1900an tiap malam, antara sembahyang maghrib dan isya, penduduk kampong Arab berkumpul untuk ikut dalam latihan ritual ratib Alhadad. Praktek ini tidak hanya dilakukan oleh para Sayid namun juga telah menyebar pada penduduk pribumi.

Meski begitu, tarekat Alawiyah cenderung kurang populer atau terkesan eksklusif hanya pada kalangan Alawiyin. Hal ini dari segi ajarannya yang memberikan kekhususan bagi para keturunan

Rasulullah untuk mencapai tingkatan tertinggi dalam penguasaan ilmu dan kepemimpinan organisasi. Celah spiritual ini, yang lebih inklusif diisi oleh tarekat Sammaniyah. Tarekat ini berasal dari nama pendirinya Syech Muhammad Abdul Karim Samman. Lahir di Medinah tahun 1719 M, ia dididik oleh ayahnya seorang ulama terkemuka. Ia tercatat mendalami ilmu agama di Mesir. Pada tahun 1760-an, namanya mulai dikenal sebagai ahli di bidang Sufisme. Pada awalnya ia termasuk syekh pada tarekat Bakariah dari Khalwatiah, namun tidak lama kemudian ia membentuk tarekatnya tersendiri di kota kelahirannya Madinah. Ia populer dan memiliki banyak pengikut. Pengikutnya berasal dari berbagai wilayah seperti Mesir, Sudan, hingga dari Asia Tenggara. Banyak pengikut tarekat berasal dari koloni Jawi yang mukim di tanah Hijaz. Salah satu murid Muhammad Salman yang terkenal dari koloni Jawi dan yang memperkenalkan tarekat ini kepada para jamaah haji dari Nusantara bernama Abdussamad Al Palembang, seorang syekh dan pendakwah tarekat Sammaniyah keturunan Palembang yang lahir dan meninggal di tanah Hijaz.

Abdussamad memiliki murid bernama Kiagus H Muhammad Akib, lahir sekitar 1760 di lingkungan kesultanan Palembang. Sesudah kembali ke Palembang, ia mulai menetap di kampung penghulon, di belakang Masjid Agung yang langsung berhadapan dengan keraton Palembang. Dari sini ia mulai mengajarkan tarekat Sammaniyah di lingkungan istana. Bahkan menurut Aliudin Mahyudin (1980:44) terdapat hubungan erat antara tarekat ini dengan Sultan Mahmud Bahaudin. Sultan pada tahun 1776 memberikan uang sebesar 500 real untuk mendirikan sebuah zawiyah (pemandokan sekaligus institusi pengajaran Islam) di Jeddah. Zawiyah ini adalah simbol hubungan antara Palembang dan Timur Tengah, dan sbagai legitimasi kekuasaan Sultan Palembang dalam lingkup spiritualitas. Setidaknya seperti penguatan legitimasi kekuasaan raja-raja di Jawa untuk mendapatkan gelar Sultan dengan mengirimkan utusannya di tanah Hijaz sebagai tribute terhadap keagungan Kesultanan Ottoman.

Selain itu, fungsi zawiyah ini dimanfaatkan untuk tempat propaganda ajaran Sammaniyah, dan sebagai tempat singgah bagi orang-orang Palembang yang melakukan ibadah haji, mengingat Jeddah sebagai kota pelabuhan di mana pertama kalinya para jamaah haji dari Nusantara menginjakkan kakinya di tanah Hijaz. Petunjuk lainnya hubungan antara kesultanan dan tarekat Sammaniyah dijumpai dalam bentuk naskah yang berasal dari keraton Palembang. Terdapat Kitab yang berjudul *Bahr al-ajab*, dikarang oleh Kemas Muhammad bin Kemas Ahmad. Kitab itu ditulis atas perintah Sultan. Kemas Muhammad sendiri telah menulis kitab dengan judul *Hikayat Kramat Syekh Muhammad Samman*. (Drewes 1977:225). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesultanan Palembang memiliki peran penting dalam menyebarkan dan melindungi kehadiran Sammaniyah.

Meskipun kesultanan Palembang runtuh pada tahun 1821 bukan berarti runtuh juga tarekat Sammaniyah. Bagi keluarga basawan inti tarekat ini justru sebagai instrument dalam mempererat hubungan patronase dengan pengikutnya. Seperti yang dilakukan oleh Panembahan Bupati saudara lelaki Sultan Mahmud Badaruddin, sultan terakhir sebelum kekuasaan kesultanan diambil alih oleh pemerintah colonial Hindia belanda, Ia tetap memelihara jaringan Sammaniah, menjadi pelindung bagi perkembangannya melalui uang pension yang diterimanya dari penguasa colonial.

Hingga saat ini tarekat Sammaniyah memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat Palembang. Perkembangannya kian hari kian meningkat. Tarekat itu masih dipelihara terutama dari kalangan bangsawan yang mana sebenarnya gelar yang dimilikinya tidak ada pengaruh apa-apa jika tidak memiliki instrument mempererat ikatan patronase dengan masyarakat lainnya. Meski tarekat ini sangat inklusif, namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam tarekat memiliki system silsilah dalam melembagakan otoritas keilmuan seorang pemimpin tarekat.

Peran tarekat bagi pembentukan ortodoksi cukup besar di Palembang. Buktinya tidak lain adalah para ulama terpandang Palembang utamanya yang berpusat di Mesjid Agung merupakan para guru-guru Tarekat. Meskipun Mesjid Agung bukanlah sekelompok organisasi Tarekat namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya masjid itu secara tidak langsung turut serta dalam melembagakan pengaruh tarekat melalui pelebagaan charisma ulama yang dimilikinya. Hubungan tarekat dengan kekuasaan sangatlah erat. Hal itu tidak dilepaskan dari pengaruh “karomah” yang merupakan sumber dari charisma a la tarekat. Dari situlah kelompok tarekat mampu melebur dengan penguasa, dan dari situlah sumber legitimasi akan kesaktian bagi penguasa dikukuhkan dalam ajaran Islam. Pengaruh kuat tarekat Sammaniyah dapat dilihat dari ungkapan “Ya Samman” yaitu sebutan dalam ratib Sammaniyah yang berarti tawassul kepada Syech Abdul Karim Samman yang dibaca dalam bacaan ratib, kini telah populer sebagai suatu ungkapan eksklamasi sehari-hari masyarakat Palembang. Kata itu tidak lain menggambarkan bahwa tarekat sudah masuk dalam kehidupan Islam warga Palembang.

#### 4) Peran Pemerintah Kolonial Belanda

Proses Islamisasi di Palembang pada masa akhir kesultanan Palembang dan awal kolonialisme Belanda di kota ini tidak hanya diengaruhi oleh kaum Arab dan kelompok-kelompok tarekat saja. Belanda juga ikut berperan dalam melembagakan ortodoksi Islam dengan sedikit demi sedikit menghapuskan lembaga adat yang sudah mapan.

Ketika Belanda menguasai Palembang pada tahun 1821, penduduk Palembang baru mencapai jumlah 210.000 orang. Belanda dengan estimasinya menyebut jumlah penduduk Palembang hanya

mencapai 250.000-300.000 orang, sehingga pemerintah colonial sampai pada suatu kesimpulan bahwa penduduk Palembang sangatlah sedikit. Menurut pemerintah colonial salah satu penghambat dari laju pertumbuhan penduduk adalah adanya aturan adat pernikahan yang terlembaga yakni adanya uang jujur yang tinggi. Syarat perkawinan adalah membayarkan uang jujur yang harus diserahkan kepada pihak keluarga pengantin wanita. Uang jujur ini berkisar antara 30-60 rial bagi kalangan rakyat pedesaan sampai 100 rial bagi kalangan elit. Dengan demikian jujur merupakan beban bagi laki-laki yang akan menikah. Kaum laki-laki harus bekerja keras untuk memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan, sehingga banyak kaum laki-laki yang menikah ketika sudah melewati usia 30-an. Banyak perempuan yang tidak kawin dan sewaktu pesta adat di desa, tidak jarang kelihatan wanita setengah baya mengikuti tarian para gadis, karena mereka belum termasuk golongan yang sudah menikah. Untuk mendongkel dominasi jujur, pemerintah colonial mengajak sekutu yang tidak lazim yaitu para ulama sebagai penentu hukum Islam. Hukum Islam mengandung unsur yang dapat dipakai untuk melawan tradisi perkawinan jujur. Pertama, fikih tidak mengenal pembayaran jujur kepada orang tua pengantin wanita, namun sebaliknya, untuk menentukan agar perkawinan itu sah, pengantin pria wajib memberan hadiah kepada pengantin wanita yang disebut mahar. Mahar adalah milik istri selama perkawinan, ia bebas untuk menggunakannya. Mahar adalah syarat dilangsungkannya pernikahan, tanpa itu suatu pernikahan menjadi tidak sah. Tentang besarnya mahar tidak ada kesepakatan mengenai jumlah yang harus dibayarkan, namun ada intinya besarnya mahar ditentukan oleh kesepakatan atau pengantin pria tergantung pada kemampuannya.

Dengan didasarkan pada hukum Islam, pemerintah colonial selanjutnya berusaha menghapus pernikahan jujur dengan menetapkan jumlah mahar atau mas kawin sebesar Nlg.5.5. Selanjutnya dengan mengatasnamakan pangeran penghulu di Palembang, birokrasi agama diberi hak untuk bertindak sebagai wali pada akad nikah, jika pihak laki-laki dari keluarga mempelai perempuan tidak menyetujui pernikahan karena tidak menggunakan pernikahan jujur. Ketentuan baru itu dianggap merongrong posisi pihak berunding dari keluarga perempuan. Sebelumnya, besarnya jujur ditetapkan lewat perundingan, dan baru dapat dilangsungkan pernikahan jika orang tua pengantin wanita menyetujui uang jujur yang ditawarkan. Jika mereka menolak, tidak dapat dilakukan perkawinan yang sah, akan tetapi dalam keadaan yang baru, pengantin wanita dan pria dapat melangsungkan pernikahan langsung kepada penghulu jika menemui proses negosiasi yang buntu antara kedua keluarga.

Tujuan kebijakan itu telah dirumuskan pada tahun 1824, namun pelaksanaannya baru dilakukan selama masa jabatan residen HF Bushckens (1840-1841). Masih didasarkan system politik

kesultanan, residen Palembang mewarisi pegawai pegawai agama Islam, yang selanjutnya masuk dalam struktur pemerintahan colonial. Secara resmi peralihan dilakukan sesudah jatuhnya keraton, berdasarkan Reglement voor de regeling der Mahomedaansche Kerkelijke Zaken (kebijaksanaan pengaturan urusan keagamaan Islam) tanggal 13 Maret 1832. Pokok hirarki pegawai agama ialah khatib dan lebai penghulu yang masing-masing diangkat di tingkat dusun dan marg harus mendapatkan pengesahan dari puncak piramida birokrat dibentuk oleh penghulu dan khatib sekitar Mesjid Agung Palembang di bawah pimpinan Penghulu Nata Agama. Tugas penghulu adalah sebagai juru dakwah tertinggi di seluruh karisidenan, di bawahnya berdiri semua ulama tanpa adanya perbedaan dan wajib mengikuti perintahnya dalam hal-hal rohani. Penghulu bertugas mencatat semua perkawinan, perceraian dan masalah warisan kaum Muslimin, yang harus dilaporkan menurut model buku Register Khatib dan melaporkannya kepada residen setiap bulan. Kebijakan ini awalnya direspon dengan pengacuan terutama di kalangan pemerintah adat. Mereka melakukan perlawanan terhadap pengangkatan para penghulu, di samping kemampuan para pegawai urusan agama sangatlah rendah. Kendala lainnya oleh residen adalah ketiadaan penghulu di desa-desa di Pedalaman. Oleh sebab itu, sesudah tahun 1841 diusahakan memperbaiki keadaan dengan mengikat jaringan lebai penghulu dengan struktur yang terhubung dengan pemerintah di ibu kota Palembang. Proses penghapusan adat lama dengan adat yang baru berjalan efektif di daerah ilir namun tidak di uluan. Iilir karena memiliki system kekerabatan patrilineal yang cenderung longgar di mana pembagian warisan hanya ada pada keluarga inti bukan pada jurai seperti halnya di uluan.

Untuk melembagakan aturan itu, pihak Kolonial memutuskan untuk mendirikan masjid di setiap kampung. Di samping itu dilakukan upaya pengangkatan khatib dan lebai penghulu, artinya jumlah pegawai urusan keagamaan semakin bertambah. Menurut Jeroen Peeters pada tahun 1853 terdapat 632 pegawai urusan agama dan bertambah menjadi 1057 pada tahun 1870 meskipun penyebaran lebai penghulu tidak merata di tiap-tiap kampung. Selain itu untuk meningkatkan kualitas pegawai agama, pemerintah colonial menentukan syarat minimum yaitu harus bisa membaca dan menulis tulisan Jawi. Untuk upaya itu kepala adat harus mengirimkan ke Palembang untuk dilantik oleh Residen namun harus melewati ujian yang diberikan Pangeran Penghulu Nata Agama. Begitu juga dengan pengangkatan Pangeran Penghulu Nata Agama harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur Hindia Belanda, bahkan pada tahun 1930-an, kepala Kantor Agama GF Pijper, seorang ahli Indologi lulusan Leiden bertugas untuk menguji kemampuan bahasa Arab dan Fiqh para calon Hoofdpenholoe (Penghulu Nata Agama)

Namun persekutuan antara kelompok ulama dengan pemerintah colonial Belanda tidak bertahan lama. Tanpa diketahui Belanda, para pegawai melakukan propaganda tarekat Sammaniyah hingga ke desa-desa. Dengan memanfaatkan kedudukannya, para pegawai agama mulai memperkenalkan tarekat kepada penduduk desa dan kepala adat. Selain itu Belanda menunjuk para priyayi dan mantri Palembang untuk menjadi perwakilannya di desa-desa untuk mengurus administrasi. Mereka menjadikan tarekat sebagai alat untuk megukuhkan kembali kedudukan sosialnya di tengah-tengah masyarakat bahkan meberlakukan denda jika ada masyarakat yang tidak muncul di balai-balai untuk mengikuti latihan ratib dan zikir tarekat tersebut. Akibatnya Belanda menggap persekutuan itu hanya akan membahayakan pemerintah colonial dan menyebutnya sebagai “penyebar Islam Fanatik. Oleh sebab itu belanda segera menggantikan para penghubung pemerintah yang berasal dari priyayi dan mantra denga kontrolir Belanda pada tahun 1864. Selanjutnya Belanda juga menghapuskan ketentuan yang mewajibkan calon lebai penghulu untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan didepan pangeran penghulu di Palembang dengan keputusan residen tanggal 24 Juli 1873 No 426. Dari kebijakan itu berarti Belanda berupaya untuk memutus jalinan kebudayaan kota dengan desa, memperkuat kembali hokum adat, serta mencegah penetrasi Islamisasi lebih lanjut. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa daerah di iliran Palembang telah banyak yang terpengaruh oleh ofensif Islamisasi, terbukti dengan banyak berdirinya Masjid di daerah iliran.

Belanda juga mengubah kedudukan penghulu agama secara fundamental yang berbeda kewenangannya pada masa kesultanan. Persamaannya adalah Penghulu merupakan bagian dari birokrasi baik di pemerintahan kesultanan maupun pada pemerintahan colonial. Selain itu, Pangeran Penghulu Nata Agama serta pegawai bawahannya tetap berfungsi dalam menjalankan tugas keagamaannya. Perbedaannya, di masa kesultanan tugas penghulu hanya terbatas dalam bidang fikih ibadat (salat, puasa, zakat, haji) dan fikih munakahat (perkawinan, perceraian, rujuk dan warisan) serta masalah pendidikan agama. Pada masa colonial tugas penghulu diperluas tidak hanya di bidang agama, termasuk mengurus administrative masalah pendudukan seperti pencatatan kelahiran dan kematian, membantu pemungutan pajak, membantu pemberantasan penyakit menular, dan membantu peningkatan hasil pertanian. Namun sisi negatifnya, penghulu bertugas sebagai pengawas agama, terutama dalam bidang pendidikan dan haji dengan maksud untuk menjaga stabilitas kekuasaan colonial dalam hal ini, penghulu berusaha mencegah praktik-praktik agama yang mengarah pada pembangkangan dengan pihak pemerintah colonial. Meski begitu, secara tidak langsung sebenarnya Belanda telah mewariskan system administrasi yang rapi dan teratur yang masih dipakai hingga saat ini.

### 5) Berkembangnya Pan Islamisme

Sultan Mahmud Badaruddin meninggal pada tahun 1852 saat pengasingannya di Ternate. Keluarga sultan kembali ke Palembang, namun mereka tidak mendapatkan sambutan hangat. Anggota keluarga kerajaan yang masih tinggal di Palembang merasa keberatan untuk membantu kerabat yang telah jatuh miskin ini. Keluarga Sultan Mahmud menuntut harta peninggalan Sultan yang sebelum pembuangannya ke Ternate dititipkan kepada Panembahan Bupati. Sayangnya Panembahan Bupati menolak tuntutan tersebut. Sehingga terdapat ketegangan antara keluarga Sultan Mahmud Badaruddin dengan keluarga kerajaan. Perlu diketahui bahwasanya setelah jatuhnya kesultanan Palembang ke tangan pemerintah colonial, para bangsawan atau priyai enggatungkan pendapatan dengan menerma uang pension dari pemerintah, sementara bagi keluarga Sultan Mahmud Badaruddin yang ikut diasingkan ke Ternate tidak mendapatkan kompensasi ini.

Sesudah usaha pengembalian gagal, pada tahun 1865, cucu-cucu Sultan Mahmud Badaruddin mengambil sikap yang lebih keras. Di bawah pimpinan Raden Hanafiah sekitar 20 orang dari mereka bersumpah secara rahasia di pemakaman raja-raja di Kawah Tengkreup, untu saling membantu tanpa syarat. Kelompok ini kemudian mengadakan kepada Residen ihwal keluarga Panembahan Bupati telah berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah Residen. Baru kemudian pemerintah residen mengetahui mengenai fitnah tersebut, sehingga pemerintah membubarkan persekutuan Raden Hanafiah

Ketegangan antara Residen dengan kelompok Priyayi kembali memuncak. Ketika pada tahun 1880, pemerintah mulai memangkas uang pension mereka, dan memasukkannya kedalam register pajak. Para bangsawan tidak terbiasa denga system pajak yang diterapkan kepada meka, sehingga mereka menganggap peraturan ini sebagai penghinaan. Hal inilah yang membuat terjadinya pemberontakan seperti yang dilaporkan Residen Palembang PP Laging Tobias pada tahun 1881.

Bersamaan dengan suasana yang penuh ketegangan ini, Palembang dikejutkan dengan kedatangan syekh dari Mekkah. Abdul Malik alias H Mustafa memiliki latar belakang militer, sehngga orang Palembang menganggapnya sebagai utusan dari Sultan Ottoman. Kedatangan Abdul Malik pada Maret 1881 diikuti oleh kedatangan seorang bernama Abdul Wahid yang juga mengaku pernah melakukan dinas militer dalam tentara ottoman dan dihargai dengan dekorasi kehormatan karena jasa-jasanya dalam pertempuran. Kedatangan dua utusan Kesultanan Ottoman tersebut bukan tanpa sebab. Pertama, ditinjau dari geopolitik internasional di mana kesultanan Ottoman yang memiliki usaha untuk menyaingi imperialism barat di dunia Islam. Sultan Abdul Hamid II

menancapkan perwakilannya hingga ke Asia Tenggara. Ia mengutus Abdullah Al Juneid sebagai konsul di Singapura pada tahun 1864. Sepeninggalnya Abdullah Al Juneid, kekosongan jabatan itu dimaksudkan untuk diisi oleh saudara Abdullah Sayid Juned Aljuneid, namun usaha pengangkatan konsul tersebut dihalang-halangi oleh Inggris. Meski begitu Sayid Juned Aljuneid secara diam-diam melakukan upaya propaganda anti imperialisme barat terutama di kalangan jaringan tarekat. (Reid 1967:271-279). Hubungan antara Juned Al Juneid dengan kesultanan Palembang diperantari oleh Syarif Abdullah. Ia adalah saudara besan dari Juned. Ayah Syarif sendiri adalah penduduk Palembang yang bernama Sayid Umar Abdullah yang termasuk rombongan Sultan Mahmud Badaruddin selama pembuangannya di Ternate. Syarif Abdullah kemudian dinikahkan dengan putri Sultan Mahmud Badaruddin Raden Ayu Asima.

Syarif Abdullah lah yang kemudian memperantai kedatangan kedua utusan dari Turki tersebut guna memobilisasi keturunan Sultan Mahmud Badaruddin yang berada di Palembang. Sebenarnya bentuk-bentuk pemberontakan belum menjadi manifest yang besar, hanya kemungkinan sebuah rencana, berupa kabar angin, yang sudah diendus oleh Resident Palembang. Resident mencurigai gerakan tersebut terdapat pada pertemuan-pertemuan dzikir yang diadakan oleh tarekat Naqsyabandiyah yang dianut oleh para bangsawan dengan kedua utusan Turki tersebut. Kabar angin itu telah menimbulkan kekhawatiran dari Resident Palembang Laging Tobias, sehingga ia menyuruh aparat untuk melakukan investigasi atas pertemuan-pertemuan rahasia yang melibatkan keluarga kesultanan.

Dari sini membuktikan bahwa Palembang merupakan sebuah kota yang sangat terbuka bagi dinamika sosial keagamaan. Keterbukaan ini tidak lain disebabkan karena posisinya yang strategis sebagai jalur perdagangan yang ramai. Jalinan perdagangan juga diperkuat dengan jalinan patronase, hubungan yang saling menggantungkan antara pedagang besar dan pedagang perantara. Di sini pedagang besar terutama dari golongan Arab memiliki usaha untuk mengubah modal perdagangannya menjadi modal sosial dengan memperkuat pengaruhnya melalui pengajaran Agama. Sedangkan para pedagang perantara adalah penduduk pribumi, yang secara naluriah memiliki antusiasme terhadap proses pengajaran dan memandang orang Arab sebagai panutan dalam beragama Islam, selain agama dapat mempertahankan atau meningkatkan status sosial mereka dalam masyarakat. Dari sini dapat diketahui bahwa agama telah berkembang dari masalah privat keyakinan menjadi suatu prestise sosial. Selain perdagangan ikatan itu juga diperkuat dengan ikatan kekerabatan. Banyak orang-orang Arab dengan status sosial yang istimewa di kalangan Kesultanan Palembang dinikahkan dengan putri-putri mereka. Bahkan dari mereka banyak yang mendapatkan

gelar kebangsawanan dan menempati posisi sentral dalam urusan agama. Melalui ikatan kekerabatan inilah maka kasus masuknya Pan Islamisme dapat masuk seiring dengan ketegangan politik yang terjadi semenjak tunduknya kesultanan Palembang ke tangan bangsa Kolonial.

Pada akhir abad ke 19 dapat diketahui bahwasanya kelompok tarekat memiliki peran besar dalam melakukan proses melakukan Islamisasi di Palembang. Tarekat tidak hanya dibawa oleh orang-orang Arab, melainkan juga dibawa oleh kelompok Pribumi terutama dari golongan Kesultanan. Dari masyarakat pribumi, pertumbuhan tarekat dimulai dari kegiatan ibadah haji. Orang Palembang kemungkinan telah memandang tanah Hijaz sebagai tempat yang bukan lagi asing dengan mereka yang disebabkan peningkatan ekonomi dan proses perdagangan antar pulau yang sangat ramai di Palembang. Orang-orang Palembang tidak hanya menjalankan ibadah haji sebagai suatu kewajiban. Melainkan sebagai sarana dalam mempelajari agama. Bahkan telah banyak orang-orang Palembang yang bermukim di Mekah. Mereka bahkan telah melahirkan Syekh di bidang tasawuf yaitu Abdussamad Al Palembangi sebagai mufti pada tarekat Sammaniyah. Zawiyah adalah tempat utama dalam disseminasi aliran tarekat, berupa pemondokan yang digunakan oleh para Jemaah haji untuk singgah sekaligus mendapatkan pengajaran tasawuf. Dari Zawiyah inilah tarekat berkembang melalui para Jemaah haji. Peran tarekat sendiri di Palembang cukup menarik, tarekat tidak hanya sebagai gerakan agama yang menekankan pada kesalehan pribadi melalui intensitas pendekatan kepada Tuhan juga sebagai gerakan sosial dalam hal ini menuntut hak-hak pribumi yang semakin dikerdilkan akibat dari kolonialisme Belanda.

Peran tarekat tidaklah surut meskipun Palembang mengalami Islamisasi selanjutnya yaitu mulai diintroduksikannya lembaga-lembaga pendidikan modern. Lembaga pendidikan modernis di Palembang tidak dapat disebut bahwasanya itu hanya dikembangkan oleh organisasi Islam modernis seperti Muhammadiyah. Justru lembaga pendidikan modern juga diprakarsai oleh kelompok Islam ortodoks yang menetapkan paham akidah ahlussunah wal jamaah dan fiqh madzhab Syafi'iyah sebagai ajaran resminya, seperti halnya perguruan Al Ihsan dan perguruan Nurul Falah Perguruan yang terakhir itu merupakan perguruan yang didirikan oleh ulama pribumi (Palembang) pada tahun 1934 di 30 Ilir Palembang. Bahkan perguruan Nurul Falah di antara pendirinya merupakan tokoh tarekat Sammaniyah seperti KH Kemas Abdullah Azhari. Dari situ dapat dibuktikan bahwasanya menyebut kelompok tradisional dan modernis sebagai tipologi dalam menyebutkan Islam Palembang terkesan sangatlah bias, karena masyarakat Palembang sangat cepat dalam menyerap modernisasi terutama di wilayah Ilir sehingga baik itu Muhammadiyah atau kelompok Ahlus Sunnah Wal Jamaah Syafi'iyah dan Tarekat pun sama-sama cepat dalam menyerap modernisasi. Jadi

anggapan bahwasanya tarekat di Palembang semakin tenggelam seperti dikatakan dalam dinamika zaman sangatlah tidak tepat, mereka memiliki kemampuan beradaptasi dengan modernistas, mereka bersifat inklusif dalam keanggotaannya tidak memandang sekat-sekat kesukuan atau regalia, selain itu mereka mampu bergerak secara informal melalui peran para ulama-ulama sekitar Masjid Agung begitu juga dengan para tokoh-tokoh agama yang berada ditingkat kampung-kampung. Mereka tetap memiliki pengikut tersendiri yang tetap lestari, jaringan mereka semakin terlembaga dengan kemunculan Nahdhatul Ulama, berbeda dengan NU di Jawa yang dikembangkan melalui jaringan Pesantren, NU di Palembang berkembang melalui jaringan Tarekat, terutama Tarekat Sammaniyah.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan Perkembangan Ortodoksi Islam Di Palembang Hingga Awal Abad XX dapat ditarik kesimpulan Bahwasanya Kecenderungan Pemahaman keislaman di Palembang adalah pemahaman keislaman yang ortodok dikarenakan penanaman terhadap syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari peran para Sayid atau Alawiyin serta Peran tarekat bagi pembentukan ortodoksi cukup besar di Palembang. Buktinya tidak lain adalah para ulama terpadang Palembang utamanya yang berpusat di Masjid Agung merupakan para guru-guru Tarekat. Meskipun Masjid Agung bukanlah sekelompok organisasi Tarekat namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya masjid Agung secara tidak langsung turut serta dalam melembagakan peneruh tarekat melalui pelembagaan charisma ulama yang dimilikinya. Hubungan tarekat dengan kekuasaan sangatlah erat. Hal itu tidak dilepaskan dari pengaruh “karomah” yang merupakan sumber dari charisma ala tarekat. Dari situlah kelompok tarekat mampu melebur dengan penguasa, dan dari situlah sumber legitimasi akan kesaktian bagi penguasa dikukuhkan dalam ajaran Islam. Peneruh kuat tarekat Sammaniyah dapat dilihat dari ungkapan “Ya Samman” yaitu sebutan dalam ratib Sammaniyah yang berarti tawassul kepada Syech Abdul Karim Samman yang dibaca dalam bacaan ratib, kini telah populer sebagai suatu ungkapan eksklamasi sehari-hari masyarakat Palembang. Kata itu tidak lain menggambarkan bahwa tarekat sudah masuk dalam kehidupan Islam warga Palembang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfian. 1971. *Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk DPR*. Jakarta : Lektas
- Azra, Azzyumardi. 2006. *Islam in the Indonesian world : an account of institutional formation*. Mizan, Bandung.

- Collins, Elizabeth Fuller. 2007. *Indonesia Betrayed : How Development Fails* University of Hawai'i Press
- Clifford Geertz. 1960. *The Religion of Java*. Illinois : University of Chicago Press.
- Feith, Herbeth dan Lance Castles (ed). 1988. *Pemikiran Politik Indonesia : 1945-1965*. Jakarta: LP3ES
- Giddens, Anthony. 1993. *Sociology*. Second Edition. Cambridge-UK: Polity Press. 1993
- Gottschalk, Lois. 1986. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta : UI Press
- Kahin, Audrey R. dan George McT. Kahin. 1997. *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri : Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- , 2005. *Dari Pemberontakan Ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia. 1928-1998*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- , 2012. *Islam, Nationalism, and Democracy : A Political Biography of Mohammad Natsir*. Singapore : NUS Press
- Leirissa, R.Z. 1997. *PRRI Permesta : Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Lev, Daniel. S. 2009. *The Transition To Guided Democracy : Indonesian Politics 1957 – 1959*. Cornell Southeast Asia Program Publications.
- Liddle, R. William. 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru : Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta : LP3ES
- Madinier, Remy. 2015. *Islam and Politics in Indonesia : The Masyumi Party Between Democracy and Integralism*. Singapore : NUS Press
- Moleong. Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Peeters, Jerome. 1997. *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. Jakarta: INIS